RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 31/PUU-XVII/2019

“Netralitas Politik di Perguruan Tinggi”

I. PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, yang selanjutnya disebut Pemohon I;
Ikhsan Prasetya Fitriansyah, yang selanjutnya disebut Pemohon II.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005, dinyatakan: “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena **penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan**, maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945.
5. Bahwa objek permohonan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Tata Negara yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 (bit.do/statutaUI);
 4. Saat ini, Universitas Indonesia tempat Pemohon I menuntut ilmu adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki Majelis Wali Amanat sebagai organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI (bit.do/tugasMWAUI), termasuk memilih dan memberhentikan Rektor UI, selanjutnya permasalahan terkait MWA UI terjadi pada tanggal 14 Maret 2019 yakni telah dilakukan pemilihan anggota Majelis Wali Amanat UI dari Unsur Masyarakat terpilih menimbulkan polemik, yakni Erick Thohir dan Saleh Husin;
 5. Bahwa sebagai seorang mahasiswa, Pemohon I memegang teguh prinsip *Political Neutrality in Classroom*, yakni institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Oleh karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memosisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik;
 6. Pemohon I mempersalahkan adanya intervensi dari afiliasi politik tertentu dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, dimana dalam kasus Pemohon I

adalah MWA UI. MWA UI merupakan badan tertinggi UI yang padanya melekat kewenangan yang mempengaruhi kebebasan berekspresi mahasiswa UI, salah satu diantaranya adalah Pemilihan Rektor UI;

7. Pada bulan Oktober 2019, akan dilakukan Pemilihan Rektor UI oleh MWA UI. Dengan adanya anggota MWA UI yang terafiliasi politik tertentu, sangat mungkin akan adanya intervensi politik dalam pemilihan Rektor tersebut. Tentu, jika Rektor yang terpilih ditunggangi oleh afiliasi politik tertentu, sangat terbuka kemungkinan adanya pengekangan kritik mahasiswa terhadap politisi yang mana Rektor terafiliasi dengannya;
8. Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 (bit.do/StatutaUnivGadjahMada). Pemohon aktif dalam kegiatan kampus diantaranya menjadi Direktur Eksekutif *Law and Debate Society* UGM yang memiliki *concern* terkait permasalahan dan isu yang dihadapi bangsa Indonesia;
9. Pemohon II mempermasalahkan UU *a quo* yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Pada pandangan Pemohon II, prinsip *Political Neutrality in Classroom*, termasuk juga bebasnya pengelolaan pendidikan tinggi dari pengaruh politik;
10. Para Pemohon mendalilkan dirinya tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebab UU *a quo* karena tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan Tinggi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 12/2012 yaitu:**

1. Pasal 62 ayat (1):

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

2. Pasal 63:

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. akuntabilitas;

b. transparansi;

c. nirlaba;

d. penjaminan mutu; dan

e. efektivitas dan efisiensi.

3. Pasal 64 ayat (3):

Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

a. organisasi;

b. keuangan;

c. kemahasiswaan;

d. ketenagaan; dan

f. sarana prasarana.

4. Penjelasan Pasal 65 ayat 3 huruf b:

Cukup jelas.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon tidak *nebis in idem*

Para Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem*, karena jika dilihat pada materi substansi dan petitum permohonan-permohonan sebelumnya yakni Putusan Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan Nomor 111/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013, terdapat perbedaan konstitusionalitas dimana permohonan sebelumnya mempermasalahkan “eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum” dan “lingkup ekonomi” dari pendidikan tinggi. Permohonan Para Pemohon tidak menyangkut hal-hal tersebut, melainkan otonomi institusi pendidikan tinggi yang bebas dari pengaruh politik, sehingga Permohonan Para Pemohon tidaklah *nebis in idem*;

A. *Political Neutrality In Classroom* merupakan asas fundamental Pendidikan Tinggi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi tercapainya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

1. Bahwa dalam UU 12/2012, terlihat secercah kesamaan jiwa (*geist*) dengan pandangan Bung Hatta akan tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 3 yang berbunyi, “...Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik”, dan juga penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, “...Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...”;
2. Bahwa UU 12/2012 tidak menjabarkan, menentukan maupun menuangkan lebih dalam lagi cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut, yang mana caranya seharusnya adalah dengan menegakkan Prinsip *Political*

Neutrality in Classroom. Prinsip ini memiliki makna bahwa Perguruan tinggi harus terbebas dari pengaruh politik demi menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan nilai kebenaran. Sehingga, institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik;

3. Menurut Daoed Joesoef, mahasiswa pada hakikatnya bukanlah "manusia rapat umum" (*man of public meeting*), tetapi manusia penganalisa (*man of analysis*). Kampus harus hadir sebagai komunitas intelektual yang mengkaji politik, tapi tidak ditunggangi kepentingan politik. Apabila otonomi dan pengelolaan kampus ditunggangi kekuatan politik tertentu, maka bagaimana bisa mahasiswa akan berpikir kritis?;
4. Tentu bukan berarti bahwa Prinsip *Political Neutrality In Classroom* akan membuat mahasiswa tidak boleh lagi mengkritisi permasalahan politik di kampus. Jika melihat kepada penjabaran di atas, justru sebaliknya. Mahasiswa memiliki kesempatan dan ruang untuk mengkritisi dan menganalisis secara rasional segala permasalahan politik yang terjadi, tanpa perlu takut ataupun tunduk pada suatu pengaruh politik tertentu. Prinsip ini memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi sivitas akademika dalam berpikir kritis, karena tidak perlu takut akan pengaruh politik apapun;
5. Oleh karena pentingnya hakikat daripada asas *Political Neutrality In Classroom*, menjadi sangat jelas bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi haruslah terdapat asas *Political Neutrality In Classroom* di dalamnya sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dituangkannya asas ini kedalam pelaksanaan pendidikan tinggi akan memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi sivitas akademika dalam berpikir kritis sehingga tidak perlu lagi terulang peristiwa seperti Orde Lama

ataupun Orde Baru. Asas ini harus dituangkan dalam UU 12/2012 mengingat bahwa asas ini adalah asas fundamental yang tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pendidikan tinggi sehingga harus bersifat universal. Jika tidak diatur dalam undang-undang, maka timbul kemungkinan dalam suatu pengelolaan pendidikan tinggi, asas ini tidak ada. Hal ini sudah nyata terjadi dalam peraturan mengenai pengelolaan Universitas Gadjah Mada, dimana statuta UGM sama sekali tidak ada ketentuan akan *Political Neutrality in Classroom*, dan juga tidak melarang pengaruh politik dalam pengelolaannya. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bahwa asas *Political Neutrality in Classroom* haruslah dituangkan menjadi suatu ketentuan pada UU 12/2012 mengingat sifatnya yang sangat fundamental dan harus universal dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi.

B. Bebasnya institusi pendidikan tinggi dari pengaruh politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Otonomi Non-Akademik (Tata Kelola) Pendidikan Tinggi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan "...dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya, otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi diberikan otonomi non-akademik..." (vide. Paragraf [3.15], halaman 213] Putusan MK No. 103/PUU-X/2012);
2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 UU 12/2012 bahwa otonomi perguruan tinggi dibagi dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik (tata kelola). Otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari, menemukan, mendiseminasikan, membela, dan menjunjung tinggi kebenaran. Otonomi akademik (keilmuan) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi memiliki otonomi non-akademik yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan dalam mengatur rumah tangga sendiri. Tanpa ada otonomi nonakademik, maka otonomi akademik akan menjadi otonomi semu;

3. Selain itu, Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat) tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya Otonomi non-akademik. Melalui otonomi non-akademik, institusi pendidikan memiliki kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi cara melakukan tata kelola dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi tersebut;
4. Dalam hal penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi misalnya, jika tidak terdapat otonomi non-akademik yang bebas dari pengaruh politik, maka pada akhirnya seluruh hasil dan tujuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi tersebut hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan bukan lagi sesuai hakikatnya yang seharusnya untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia;
5. Hal ini pun telah diamini dalam UNESCO *Declaration For The Twenty First-Century* yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki sebuah sistem yang bersifat sebagai berikut: mahasiswa berhak untuk belajar, dosen berhak untuk mengajar sesuai dengan minat masing-masing, Hak untuk menentukan prioritas dan melakukan kajian ilmiah tanpa batas apapun kecuali oleh norma dan kepentingan masyarakat, Perguruan Tinggi harus toleran atas pendapat yang berbeda dan bebas dari intervensi politik. Sebagai institusi publik melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi harus menegakkan kebebasan dan keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan, serta saling membantu baik secara moral maupun materil dalam skala nasional.

C. Terlupakannya ketentuan akan institusi pendidikan yang bebas dari pengaruh politik berkontradiksi dengan tujuan dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1. Bahwa Pasal 11 ayat 3 UU 12/2012 yang berbunyi, "... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik", dan juga penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, "... Yang dimaksud dengan "akademik" dalam "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar

akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...” menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah hanya terbebas dari “kepentingan ekonomi saja” namun juga termasuk terbebas dari “pengaruh politik”;

2. Akan tetapi, keseluruhan UU 12/2012 sama sekali tidak memberikan ketentuan akan kebebasan dari pengaruh politik, padahal dalam lingkup ekonomi terdapat pasal-pasal yang jelas mengatur seperti terdapat pada Pasal 63 UU 12/2012;
3. Karenanya, ketentuan dalam UU 12/2012 menjadi kontradiktif dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi itu sendiri, sebab sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak bisa tidak, haruslah ada ketentuan yang menyatakan bahwa institusi Pendidikan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “mengelola sendiri lembaganya” **sepanjang ditafsirkan bahwa** pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu;
3. Menyatakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prinsip sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal *a quo* tidak dimaknai mencakup pula bebas dari pengaruh politik;

4. Menyatakan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “Otonomi pengelolaan di bidang non akademik” **sepanjang ditafsirkan bahwa** Otonomi pengelolaan di bidang non akademik Perguruan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terhadap frasa “Cukup Jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN badan hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).